

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang selama ini menjadi isu pelayanan publik yang seolah tak pernah usai sejak terbitnya UU Otonomi daerah NO 32/2004. Kebijakan ini berharap dapat memebrikan ruang supaya terlaksananya pemerataan pembangunan di semua daerah yang tertinggal.

Kebijakan tentang pelayanan publik artinya tujuan pembangunan adalah kemakmuran bersama. Hasil pembangunan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Laju pertumbuhan yang tinggi tanpa keseimbangan pembangunan hanya akan menyebabkan kelemahan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Otonomi daerah merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi merupakan turunan dari desentralisasi, sehingga daerah otonom adalah daerah yang memiliki prakarsa mandiri. Derajat kemandirian dan penurunan derajat desentralisasi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi maka semakin tinggi derajat otonomi

daerah. Oleh karena itu, daerah otonom merupakan daerah yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Salah satunya adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Menurut Gibson “Bungkaes 2013:46” efektifitas diartikan sebagai Penilaian tentang kinerja individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat pencapaian mereka dengan pencapaian "standar" yang diharapkan, semakin efektif mereka. Apabila diperhatikan dengan seksama, otonomi daerah tentu mempunyai sisi kelemahan terutama dari sisi efektifitas. Ada banyak penyebab lemahnya pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu faktor tersebut adalah kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerahnya secara efektif, efisien, bertanggung jawab dan berkeadilan. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke kelemahan dalam perencanaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan akuntabilitas. Fakta membuktikan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya diterjemahkan dengan benar, fakta ini menunjukkan masih banyaknya pelanggaran seperti korupsi, pemborosan, distribusi yang tidak tepat dan banyaknya berbagai pungutan daerah. Upaya dan upaya tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu kontraproduktif.

Untuk melengkapi kerjasama antara pemangku kebijakan daerah dengan rakyat, Pemkot Bandung menyusun Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2015, atau disingkat

PIPPK. Rencana tersebut bermula dari pemikiran dan sudut pandang bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan yang dinamis, dan jika dimulai dari level yang paling bawah, terutama dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah, dapat terwujud dengan baik melalui partisipasi dan partisipasi aktif dan ekstensif dari seluruh komunitas. Melalui metode *community authorization*, semua pihak terlibat, baik pemerintah daerah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas.

Semua pihak ini diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam pemberdayaan masyarakat sebagai peran utama PIPPK. Pemerintah Kota Bandung mencanangkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah (PIPPK) yang merupakan bentuk fokus Pemerintah Kota Bandung pada pembangunan yang berkeadilan. Di seluruh kecamatan Kota Bandung, setiap 100 juta Kroner Denmark (RT / RW, PKK, Pemuda) Organisasi, dll.) Model bantuan Rp 100 juta.

Kecamatan sebagaimana diatur Dalam PP No. 17/2018 tentang Kecamatan, merupakan sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap pemerintah daerah di setiap daerah dan kota di

Indonesia berlomba-lomba melakukan berbagai pengaturan yang pada akhirnya dianggap mengganggu kegiatan masyarakat dan tentunya berdampak pada kewenangan daerah suatu daerah.

Berdasarkan PP No. 38/2017 tentang inovasi daerah, Mewajibkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kecamatan dan kota beserta lembaganya untuk berinovasi. Inovasi ini harus dilakukan dalam setiap kegiatan pengelolaan pemerintahan.

Inovasi daerah berarti segala bentuk reformasi dilakukan di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Saat ini, jalan berstatus instansi Kecamatan/ kota setingkat dinas dan instansi teknis. Dijelaskan bahwa sebagian dari desentralisasi dari Bupati/Walikota kepada kepala jalan adalah untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di kabupaten. Selain itu, mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai sarana regional untuk berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pedoman program ini berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No.436/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menjalankan program PIPPK yang bertujuan untuk mendorong inovasi daerah dan sub- daerah. Sayangnya , rencana PIPPK yang dilaksanakan di seluruh ruas jalan dan kelurahan di Kota Bandung tidak berjalan mulus sesuai dengan tujuan pelaksanaan PIPPK.

Artikel ini berdasarkan data dalam laporan realisasi anggaran PIPPK yang digunakan di berbagai Kecamatan di Kota dan Kelurahan Bandung setiap tahun. Artinya, dari tahun 2015 hingga 2017, tidak semua orang dapat menyerap anggaran PIPPK dengan benar, dan angka penyerapan anggaran PIPPK di sebagian besar Kecamatan mengalami penurunan, salah satunya Kecamatan Ujung Berung. Berikut data angka penyerapan anggaran PIPPK Kecamatan Ujung Berung dari tahun 2015 hingga 2017.

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Ujung Berung Periode 2015-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2015	Rp.8.240.800.000	Rp.8.117.310.679	Rp.123.489.321
2016	Rp. 8.361.200.000	Rp.8.236.231.136	Rp.124.968.864
2017	Rp.6.382.392.467	Rp.5.812.075.999	Rp.570.316.468

Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2020

Seperti terlihat pada tabel di atas, tabel ini merupakan data dalam laporan realisasi anggaran PIPPK. Penyerapan anggaran PIPPK Kecamatan Ujung Berung selama 2015-2017 menurun atau melemah. Selama 2015-2017, realisasi anggaran dapat dilihat semakin kecil setiap tahunnya, maka perlu ditanyakan apakah penurunan tahunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya penyerapan anggaran, atau ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan PIPPK.

Efektifitas penyerapan anggaran memiliki efek implisit terhadap masyarakat utamanya masyarakat yang ikut langsung dalam perancangan biaya. Dalam menghasilkan suatu anggaran yang efektif, manajer harus mampu memprediksi masa depan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan seperti komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan. Permasalahan mengenai minimnya penyerapan anggaran di pemerintahan kerap kali dituding sebagai buruknya kinerja birokrasi. Maka dari itu harus dilaksanakan penilaian sampai mana penyerapan kecamatan di Kota Bandung dengan difokuskan pada satu kecamatan yaitu ujung berung untuk mengurus anggaran PIPPK. Dari itu semua judul pada penelitian ini diberi judul **“EFEKTIFITAS PENYERAPAN ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPK) DI KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG PERIODE 2015-2017”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang berlandaskan pada latar belakang masalah menghasilkan sebagai berikut:

- 1 Kegagalan mencapai 100% dari persentase penyerapan anggaran mengakibatkan gagalnya rencana / kegiatan PIPPK untuk mencapai tujuan, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai melalui rencana / kegiatan tersebut.
- 2 Efektifitas dalam pengelolaan anggaran bisa menjadi pengahambat dalam

realisasi PPIPK sehingga menghambat proses pembangunan wilayah berupa inovasi.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yang berlandaskan pada latar belakang dan identifikasi masalah menghasilkan adalah

1. Bagaimana efektifitas (PIPPK) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2015-2017 efektif apabila memiliki pencapaian tujuan yang sama dengan pelaksanaan?
2. Bagaimana Integrasi (PIPPK) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2015-2017?
3. Bagaimana adaptasi (PIPPK) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2015-2017?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diketahui yang berlandaskan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana efektifitas (PIPPK) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2015-2017 efektif apabila memiliki pencapaian tujuan yang sama dengan pelaksanaan;
2. Untuk mengetahui Bagaimana Integrasi (PIPPK) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2015-2017;
3. Untuk mengetahui Bagaimana adaptasi (PIPPK) di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2015-2017.”.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian diharapkan bermanfaat untuk pembaca dan penulis. Oleh karenanya manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang politik, administrasi, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penyerapan anggaran untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Berguna sebagai sumber saran yang baik, menjadi kontribusi dalam memandang cara membangun dan memberadayakan masyarakat agar nantinya suatu rencana bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Ini merupakan manfaat bagi instansi.
- b. Bermanfaat sebagai proses dalam berlatih dan menumbuhkan ilmu pengetahuan melewati penelitian dengan membandingkan teori yang didapatkan di perkuliahan dengan praktik di lapangan nantinya berharap memperoleh suatu pengalaman praktis. ini merupakan manfaat bagi penulis

F. Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah kota Bandung menetapkan sebuah program yang diatur dalam Peraturan Wali Kota No. 436 Tahun 2015 yaitu mengenai Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), rencana tersebut bermula dari ide dan sudut pandang (Wali Kota Bandung,

No. 436 Tahun 2015): Jika melalui partisipasi aktif yang luas dan partisipasi semua komunitas dari tingkat terendah, perubahan dinamis yang terjadi di masyarakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, terutama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai masalah. Metode pemberdayaan masyarakat. Karena program PIPPK ini merupakan sebuah program pemerataan pembangunan dengan bantuan 100jt/LKK, maka dalam proses penyerapan anggaran tersebut diperlukan efektifitas dari kinerja pemerintah dalam hal ini Kecamatan, yang efektif agar pengelolaan anggaran dan pemberdayaan pembangunan dapat dilakukan secara merata.

Efektifitas dalam pengertian umum menunjukkan tingkat pencapaian hasil. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa efektifitas pemerintah daerah berarti tujuan pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif untuk mencapai hasil yang direncanakan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dikatakan organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Efektivitas tidak menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Biayanya bisa melebihi anggaran, dan bisa dua kali atau bahkan tiga kali lipat dari anggaran. Efektivitas hanya memeriksa apakah rencana atau aktivitas

telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan yang harus dicapai.

Dunn menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada apakah alternatif tersebut mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan mengambil tindakan. Efektivitas sangat erat kaitannya dengan rasionalitas telaris dan selalu diukur dengan unit produksi atau jasa atau nilai moneterinya (Dunn, 2000, hal. 429). Selanjutnya, Dun menambahkan bahwa efektivitas merupakan standar evaluasi, mempertanyakan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai (Dunn, 2000, hal. 601).

Duncan mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut (Steers, 1985, hal. 53):

1. Pencapaian Tujuan

Prestasi adalah usaha total untuk mencapai suatu tujuan dan harus dianggap sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan akhir tersebut perlu dilakukan secara bertahap, baik merealisasikan bagian-bagiannya secara bertahap maupun bertahap. Realisasi tujuan meliputi beberapa faktor, yaitu: jangka waktu dan tujuan tertentu

2. Integrasi

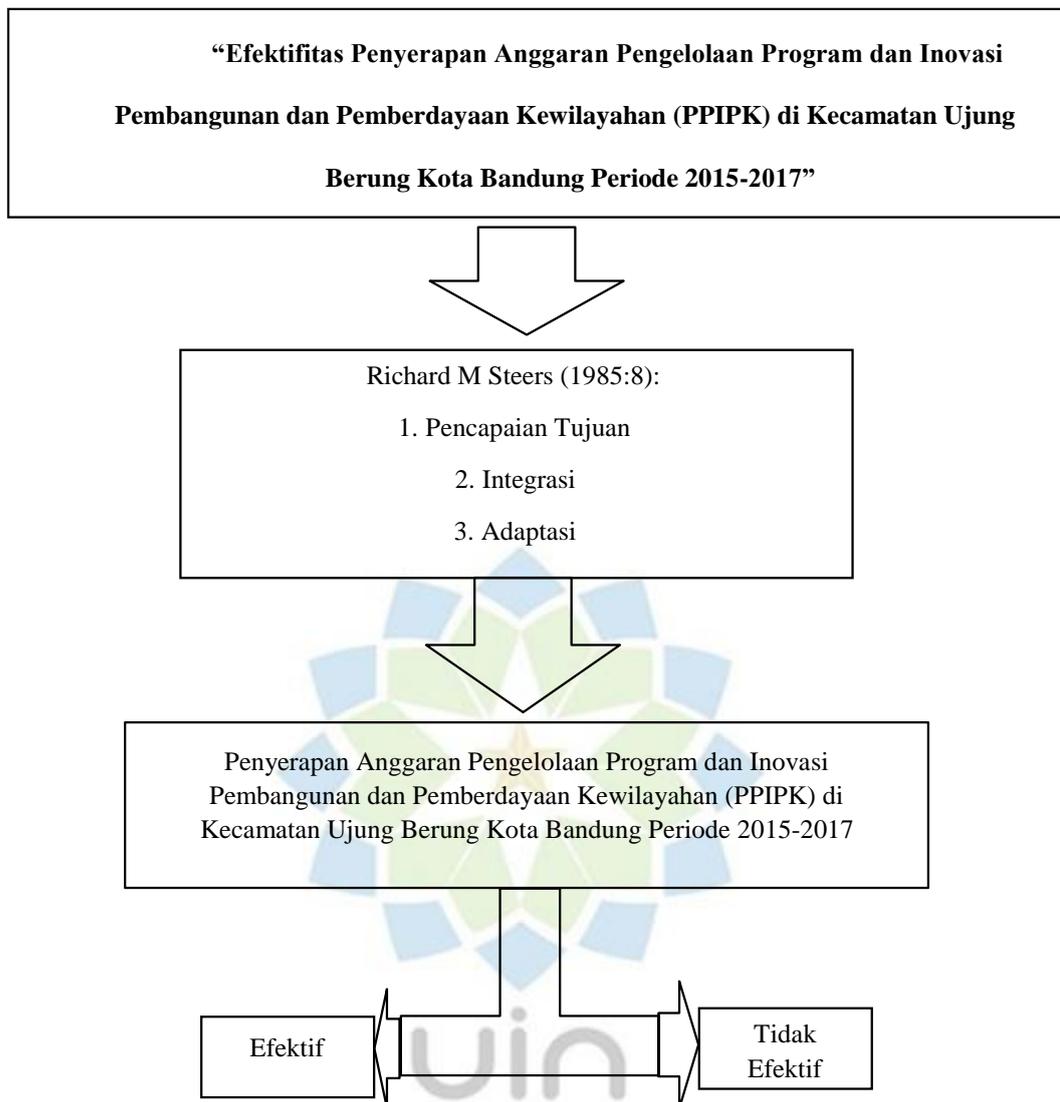
Integrasi adalah ukuran kemampuan untuk mensosialisasikan suatu organisasi, mencapai konsensus, dan berkomunikasi dengan organisasi lain. Integrasi melibatkan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Untuk alasan ini, benchmark digunakan dalam proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Richard M Steers terdapat empat factor yang mempengaruhi efektivitas yang diistilahkan sebagai karakteristik (Steers, 1985, hal. 8):

- a. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap, seperti komposisi sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur adalah cara unik menempatkan orang untuk membuat organisasi.
- b. Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar lingkup organisasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap organisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan tindakan.
- c. Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling mempengaruhi efisiensi. Dalam diri setiap orang akan terdapat banyak perbedaan, namun kesadaran individu akan perbedaan tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang bertujuan untuk membatasi segala sesuatu dalam organisasi untuk mencapai efektivitas. Kebijakan dan praktik manajemen adalah alat bagi para pemimpin untuk memandu setiap aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi.



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran